

2012

FIK KSM

Nurlinda



LAPORAN TRIWULAN KE VI FIK KSM KAB.TAKALAR
Berbuat Bersama Berperann Setara Mewujudkan Desa Mandiri

A. PENDAHULUAN



Latar Belakang

Kemandirian desa bisa diartikan sebagai kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatan atau potensi local yang dimilikinya, dimana pemerintah desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola pembangunan di desanya masing - masing dan

didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan kekayaan desanya secara maksimal. System pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga termasuk orang -orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya, serta sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh warganya.

Penganggaran pembangunan desa partisipatif dan berbasis kekuatan adalah suatu proses untuk menentukan besaran dan sumber-sumber anggaran guna melaksanakan program/kegiatan sesuai prioritas yang tertuang dalam RKP desa dengan berlandaskan pada analisis asset/kekuatan yang ada terutama yang tersedia di desa. Proses penganggaran ini melibatkan berbagai unsure yang ada di desa termasuk perempuan, warga miskin, kaum muda dan kaum termarginalkan lainnya serta pihak lain yang potensial untuk memberikan dukungan, perencanaan dalam pembangunan desa, selama ini dilakukan mengikuti system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang dikenal dengan musrembang.

Sejak bulan September telah dilakukan tahapan yang menjadi bagian dari pra-musrembang, tahapan itu tertuang dalam Desain Rencana Aksi yang telah dibuat oleh KPM bersama dengan Fasduk

sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan di desa. Pada tahapan pertama telah dilakukan sosialisasi tingkat dusun yang kemudian diplenokan di tingkat desa kemudian tahap kedua telah dilakukan Review RKPDes dan APBDes di tingkat dusun dan desa. Dari kegiatan ini menghasilkan usulan-usulan warga dan masukan/gagasan/ide yang nantinya akan dijadikan sebagai draft untuk RKP tahun berikutnya dan Draft untuk Perdes tentang PAD. Hasil dari kegiatan ini akan kembali di sosialisasikan di tingkatan warga dan kembali meminta kepada warga agar mereka bisa menerapkan aturan-aturan yang telah mereka buat sendiri khususnya untuk PAD masing – masing desa, demi terciptanya **Kemandirian Desa**.

Nama Organisasi Pelaksana	FIK KSM Kab. Takalar
Provinsi	Sulawesi Selatan
Judul Program	Program Peningkatan Kapasitas Warga dan Optimalisasi Kebijakan Publik untuk mendukung proses Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Takalar
No. PGA	82-002-002
Nama Penulis Laporan	Nurlinda
Tanggal Pelaporan	10 Januari 2012
Tahun Pelaporan	2011 Triwulan ke : 6

B. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Tabel 1. Kegiatan yang Dilakukan selama Periode Pelaporan ini

No	Kegiatan	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Keluaran		Alasan Perubahan	
			Direncanakan	Realisasi		
		Ya/tdk				
1.	Fasilitasi Proses Penyusunan APBDes Dan Perdes Partisipatif	Ya	a	Terdokumentasikannya APBDes dan Perdes yang tersusun secara partisipatif pada 25 desa.	Ada 15 dokumen APBDes yang telah diPerdeskan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lapisan dalam masyarakat.	Tidak ada perubahan
			b	Teridentifikasinya potensi – potensi pada 25 desa dampingan, yang dapat menjadi sumber pendapatan asli desa	10 desa yang didampingi secara intens telah mampu mengidentifikasi dan memetakan sumber – sumber pendapatan asli desanya.	
			c	Terbangunnya partisipasi masyarakat luas (laki-laki dan perempuan, kaum muda dan kelompok marginal lainnya) dalam	Masyarakat pada 10 desa dari berbagai unsure terutama orang miskin, perempuan dan kaum marginal, secara sadar dan kritis	

				menyusun Dokumen APBDes secara partisipatif	menghadiri setiap pertemuan dalam proses penyusunan APBDes dan Perdes	
			d	Terdokumentasikannya hal-hal penting yang terjadi di komunitas dan bisa dipelajari di pihak lain.	Serangkaian cerita sukses di tingkat warga telah terdokumentasikan terkait dengan penyusunan APBDes dan Perdes.	
2	Diskusi berkala para pemdes/kelurahan dalam mendorong inisiasi perencanaan, penganggaran dan kebijakan yang responsif gender, warga miskin dan kaum yang termarginalkan menurut nilai-nilai TKLD di desa/kelurahan	Ya	a	Tembangannya interaksi dinamis antara pemerintah desa dan warga pada 25 desa dampingan, agar pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik	Pemerintah Desa melalui Forum Apdesi secara aktif telah mendorong perubahan di tingkat pemerintahan desa dalam upaya melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggungjawab. Hal ini dapat diukur melalui dukungan kebijakan dan kontribusi nyata (undangan, tempat kegiatan, konsumsi, dll.)	Tidak ada perubahan (Berjalan sesuai rencana)
			b	Teridentifikasinya issue - issue local maupun global yang berkembang di tingkat komunitas	Sejumlah isu local yang berkembang di masing - masing desa sudah dijadikan agenda bersama untuk dilakukan solusi. Misalnya komitmen pengintegrasian program dan dokumen perencanaan	

			c	Lahirnya prakarsa di tingkat warga dan pemerintah dalam menentukan strategi-strategi penanggulangan issue	Sejumlah rencana aksi yang tertuang dalam RKPDes pada 15 desa	
<u>KEGIATAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN</u>						
1.	Kunjungan dari Bappeda, BPMPD Polman Sulawesi Barat	Tidak direncanakan oleh FIK KSM			Shering informasi dan pengalaman terkait kegiatan serupa tentang Perencanaan dan penganggaran.	Kegiatan diajukan oleh pemerintah Kabupaten Polman untuk mengadaptasikan pengalaman FIK KSM dalam mendorong Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif.

C. PESERTA DALAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Tabel 2. Kelompok Peserta Kegiatan

KEGIATAN	KELOMPOK PESERTA KEGIATAN																								
	Masyarakat		OMS		Pemerintah										DPRD		Donor		Pers		Pihak Swasta		TOTAL		
	L	P	L	P	Desa		Kecamatan		Kabupaten		Provinsi		Pusat		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P											
Fasilitasi Proses Penyusunan APBDes Dan Perdes Partisipatif	1380	837	107	115	90	39	17	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	1600	1001
Diskusi berkala para pemdes/kelurahan dalam mendorong inisiasi perencanaan, penganggaran dan kebijakan yang	0	0	3	5	20	5	2	0	5	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	33	11	

D. RINGKASAN CAPAIAN DALAM PERIODE INI

Tabel 3. Capaian Program sejak Program dimulai sampai dengan Periode Pelaporan ini

No	Indikator	Total pada saat melapor (Total to date)	
A	Lengkapi seluruh indikator di bagian ini		
1	Jumlah total Fasilitator Komunitas (KPM) yang dilatih dan melakukan fungsi Fasilitasi sejak Program dimulai sampai saat ini,	L : 20 orang	P : 57 orang
2	Jenis kelompok yang didukung melalui Rencana Aksi sejak Program sampai saat ini (Penerima Manfaat pada Program Perencanaan Partisipatif)	Jumlah sampai sekarang (orang)	
	Petani	84	
	Nelayan	102	
	Kelompok Ekonomi	36	
	PNS	11	
	Pemdes	75	
	Kelompok Pemuda	75	
	RT	179	
	Masyarakat Prasejahtera lainnya	359	
	Kelompok Wanita Tani	16	
	Buruh / tukang	25	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran pemerintah yang dikomitmenkan untuk mendukung Rencana Aksi Mitra • Realisasi 	Rp. 414.400.000,- Rp. 68.000.000,-	
4	Jumlah total dan jenis dokumen hukum dan kebijakan di tingkat desa dan kabupaten serta dokumen lainnya yang telah dihasilkan selama program berlangsung hingga saat ini.	1. 1 Dokumen Peraturan Bupati 2. 25 Dokumen RPJMDes	

		<p>3. 15 dokumen APBDes</p> <p>4. 15 Dokumen Perdes</p> <p>5. 25 buku data sensus (by name by address)</p> <p>6. 25 desa Peta Social (25 Perdes dan 1 Perbup)</p>
B	Bagian ini diisi bila Program berkaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif	
1	Jumlah total RPJMDes yang dibuat secara partisipatif sejak program	25
2	Persentase kegiatan sesuai dengan RPJMDes/RKPDes yang dilaksanakan sejak program dimulai sampai saat ini	40 % Usulan kegiatan dari warga yang direalisasikan melalui dukungan penganggaran Gerbang P2K, Sisduk, ADD, PNPM, Sosial, dll.

E. HASIL – HASIL TAK TERDUGA

Tabel 4. Hasil – hasil tak terduga

No	Hasil – hasil Tak Terduga	Faktor faktor yang Berkontribusi Terhadap Hasil
1	<p>Komitmen dan partisipasi pemerintah mulai dari Level desa hingga Kabupaten, semakin meningkat.</p> <p>Indikatornya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kehadiran dalam pertemuan semakin meningkan ➤ Memberikan dukungan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan ➤ Komitmen para pihak ➤ KPM yang sudah terorganisir

<ul style="list-style-type: none">➤ Mengundang warga dalam setiap pertemuan➤ Berkontribusi anggaran konsumsi, dll.	
<p>2 Partisipasi masyarakat miskin, perempuan semakin meningkat dengan terealisasinya usulan-usulan kegiatan yang telah diagendakan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Sudah ada pengintegrasian program meskipun belum maksimal, seperti program PNPM, ADD, Sosial dan pihak swasta.➤ Strategi yang digunakan oleh Fasduk dan KPM dalam menghadirkan warga termarginalkan seperti perempuan, warga miskin, kaum muda/anak dan kelompok marginal lainnya seperti mengundang dengan mencantumkan nama, mendatangi dan memanggil langsung, serta menjelaskan manfaat dan pentingnya suara mereka dalam perencanaan, menjadi pemicu semangat bagi warga yang berdampak pada partisipasi aktif yang semakin meningkat.
<p>3 Ada upaya KPM untuk membuat segmentasi percepatan peningkatan kapasitas dan karya perempuan melalui Gender vocal Point..</p>	<p>FIK KSM mendorong peningkatan partisipasi perempuan secara bertahap dan terus menerus.</p>

F. INKLUSI GENDER DAN SOSIAL

Membangun komunikasi yang lebih dinamis baik dengan Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan dan desa yang merupakan ciri FIK KSM dalam mendorong nilai – nilai kearifan lokal untuk mencapai Tata Kepemerintahan yang Demokratis adalah prasyarat yang harus dijunjung tinggi oleh Tim Implementasi Program dan Mitra Langsung agar nilai – nilai Gender Social Inclusive (GSI) dapat di eksplisitkan.

Desiminasi tentang manfaat dan pentingnya membuka ruang dan menciptakan peluang bagi masyarakat dan pemerintah, terus dilakukan bahkan dengan volume yang semakin ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan upaya agar output yang direncanakan dapat tercapai.

Memberikan undangan baik tertulis maupaun mendatangi langsung kepada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan kelompok marjinal lainnya untuk mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di desa masih tetap menjadi strategi yang efektif yang dilakukan oleh KPM dan Pemdes agar mereka termotivasi untuk ikut terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Meningkatkan kapasitas (Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap) pada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinal lainnya agar dapat berkontribusi lebih besar pada setiap kegiatan/pertemuan untuk menyampaikan ide/gagasan serta mengambil keputusan, juga senantiasa dilakukan secara terus menerus.

Waktu pelaksanaan pertemuan dan atau kegiatan disesuaikan dengan waktu luang bagi perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinal lainnya tetap dilakukan oleh KPM dalam melaksanakan FGD di desa masing – masing.

G. PELUANG DAN RESIKO

No.	Peluang	Resiko	Solusi	Actor
1.	Pemerintah baik dari Level Desa sampai ke Level Kabupaten, telah membuka ruang partisipasi yang semakin besar kepada KPM, dan masyarakat secara umum untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan perencanaan.	➤ Kapasitas dan Keterampilan masing - masing KPM dan masyarakat secara umum masih terbatas, sehingga kemampuan adaptasinya sangat bervariasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemetaan potensi kelembagaan Forum KPM ➤ Pemetaan potensi masyarakat sasaran terutama perempuan, masyarakat miskin dan kaum marjinal lainnya. ➤ Pelatihan penguatan kapasitas terkait hasil pemetaan 	➤ Fasilitator FIK KSM
2.	Adanya Komitmen Pemerintah Desa yang tertuang dalam rekomendasi pada saat review refleksi proses musrenbang, bahwa "proses perencanaan partisipatif yang dilaksanakan saat ini hendaknya menjadi Model pelaksanaan Musrenbang di masa yang	➤ Proses perencanaan yang diharapkan menjadi model perencanaan Musrenbang dimasa yang akan datang, berpotensi menjadi "hanya impian belaka jika tidak dibackup dengan baik	Mendorong lahirnya produk hukum sebagai dukungan kebijakan dalam bentuk Perda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nurlinda (Direktur FIK KSM) ➤ Muh. Hasim (Kasubid Capil) ➤ Rahmansah Lantara (Kasubid Ekonomi)

	akan datang.	dukungan kebijakan"		<p>Bappeda)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jamaruddin (Kasubid Litbang Bappeda) ➤ Pahlawang Maulana (Ketua Apdesi Takalar) ➤ H. Abd. Rauf Siriwa (DPRD Takalar) ➤ Nurdin Tula (Kades Parappunganta) ➤ Ridwan Buana (Kabid Pemerintahan Desa BPMPD) <p>Yang terhimpun dalam tim perumus yang akan menyiapkan draf Perda.</p>
3.	Desiminasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin/terus menerus ke pemerintah baik kabupaten, kecamatan dan desa juga ke	➤ Sosialisasi yang dilakukan bisa berpotensi konflik jika penjelasannya bias.	➤ Membentuk Tim Fasilitasi yang bertugas untuk melakukan review	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua Forum Apdesi ➤ Ketua Forum KPM ➤ FIK KSM

	<p>kalangan masyarakat telah membuahkan hasil.</p>		<p>terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Memperkuat kapasitas Tim</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan media alternative sebagai rekam jejak terhadap kegiatan-kegiatan konkrit yang telah dilakukan sehingga dapat membantu meminimalis konflik yang mungkin terjadi akibat salah tafsir. Mis : karena masyarakat berfikir ada bantuan, dll. ➤ Membangun kemitraan dengan organisasi 	
--	--	--	---	--

			<p>masyarakat silpil (DMS) untuk ikut terlibat secara sadar dan kritis dalam mengawal nilai – nilai Partisipatif, transparan, dan akuntabel di Kab. Takalar</p>	
4.	<p>25 Desa telah memiliki Dokumen Perencanaan dan penggaran partisipatif yang telah dihasilkan melalui proses fasilitasi oleh KPM 15 desa telah memiliki dokumen APBDes dan Perdes yang disusun secara partisipatif.</p>	<p>➤ Dokumen belum diintegrasikan secara maksimal karena masing – masing program belum terintegrasi secara maksimal contohnya : Program PNPM.</p>	<p>➤ Koordinasi yang intens antar pelaku (Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan desa, KPM, PNPM, FIK KSM, dll.)</p> <p>➤ Mengintegrasikan hasil perencanaan dengan program pemberdayaan lainnya yang ada dikabupaten Takalar.</p>	<p>➤ Pemerintah Kabupaten ➤ Pemerintah Kecamatan ➤ Pemerintahan Desa ➤ Fasilitator PNPM ➤ BPMPD ➤ FIK KSM ➤ Bappeda</p>

			➤ Memperkuat kapasitas warga untuk mendorong lahirnya Perdes dan APBDdes yang partisipatif	
--	--	--	--	--

H. BELAJAR DARI PENGALAMAN

Program yang dilaksanakan dengan menginternalisasi nilai – nilai GSI, Dimana warga miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok marjinal lainnya menjadi target utama untuk memperoleh kesetaraan dalam hal memperoleh dan memanfaatkan peluang, maka FIK KSM sebagai lembaga yang mengawal program ini terus berupaya untuk melakukan inovasi – inovasi atau kreatifitas baru, agar program bukan hanya menarik dari sisi proses tetapi juga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Sejak program ini dimulai, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu mengutamakan keterlibatan aktif perempuan, warga miskin, kaum muda dan termarjialkan lainnya, sehingga kiat – kiat cerdas tetap dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat warga untuk tetap terlibat dalam setiap proses belajar bersama yang dilakukan agar perempuan dan kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan bisa meningkatkan kemampuannya dan semakin kritis dalam mengawal dan mendorong terpenuhinya hak – hak mereka.

Indicator yang kami gunakan untuk mengukur sejauhmana GSI terinternalisasi dalam setiap tindakan warga adalah kegiatan yang muncul dalam draf RKP apakah sudah responsive gender, warga miskin, kaum muda dan kelompok marginal lainnya atau tidak. Tetapi RKP yang terfasilitasi oleh KPM telah menunjukkan bahwa nilai – nilai GSI telah dipraktekkan dengan baik meskipun masih harus diperbaiki dan disempurnakan.

Caranya adalah :

- Memotivasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan hadir pada setiap pertemuan
- Pelaksanaan pertemuan disesuaikan dengan waktu luang dan tempat pertemuan agar perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan bisa hadir.
- Mengajak dan memberi undangan kepada perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan pada setiap pertemuan Perempuan, kelompok miskin, kaum muda dan termarjinalkan mempunyai hak yang sama sebagai warga untuk berpartisipasi pada pembangunan desa
- Dengan peluang – peluang yang ada, maka perempuan akan diberi peran dan tanggungjawab yang harus banyak dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dan berdampak positif pada perempuan untuk kesejahteraan hidupnya



I. RENCANA KEGIATAN BERIKUTNYA

Tabel 5.

Kegiatan yang Direncanakan untuk Dilakukan selama Periode Pelaporan Berikut

No	Kegiatan yang Direncanakan		Keluaran yang Direncanakan
1.	Review Refleksi hasil Proses penyusunan APBDes Dan PERDes Partisipatif	a	Melakukan review terhadap proses hasil-hasil penyusunan APBDes yang dilakukan bersama masyarakat
		b	Sharing pembelajaran, pengalaman dan Informasi antar Fasilitator Pendukung, dan KPM
		c	Melakukan review refleksi tentang Pendalaman dan pengembangan metodologi yang diterapkan
		d	Mendapatkan pembelajaran yang terkait dengan kekuatan dan hambatan yang diperoleh dari apa yang telah dilakukan dan apa yang dirasakan selama proses fasilitasi APBDes.
		e	Mengidentifikasi temuan-temuan kunci sebagai hasil pelaksanaan program untuk merancang proses fasilitasi selanjutnya.
		f	Mendapatkan gambaran tentang proses partisipasi masyarakat yang terpinggirkan (kaum miskin dan perempuan) dalam seluruh tahapan kegiatan.

		b	Sharing pembelajaran dan pengalaman antar Kader Perberdayaan Masyarakat
6.	Lokakarya Memperkuat Proses Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan	a	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan
		b	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun klasifikasi masyarakat yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan utamanya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarjinalkan lainnya
		c	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus LPM Desa/Kelurahan dalam menyusun kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum muda, dan kelompok termarjinalkan lainnya

J. CERITA PERUBAHAN BERMAKNA

BANYUANYARA MENUJU DESA MANDIRI

Banyuanyara adalah salah satu desa pemekaran yang terletak di Kecamatan Sanrobone, dengan luas wilayah 3.699.429M dengan jumlah penduduk 3030 jiwa. Desa Banyuanyara yang terbentuk sejak tahun 1989 telah dipimpin sedikitnya oleh 4 orang kepala desa. Anyer adalah sebutan keren yang sengaja diletakkan oleh anak-anak mudanya, desa yang dikenal masih kental mempertahankan adat-istiadat leluhurnya ini, memang memiliki keunikan dari desa-desa lainnya. Misalnya saja tempat wisata yang banyak dikunjungi orang baik dari dalam maupun luar desa yang dikenal dengan nama **Bungung Barania** yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti **Sumur Berani** ini, masih sarat dengan hal-hal yang berbau mistik.

Drs. Subair daeng Ewa adalah satu dari kepala desa yang ada di Kabupaten Takalar yang memiliki ide dan komitmen yang tinggi untuk melakukan revolusi di desanya. Sosok pemimpin yang dikenal saleh dan sederhana ini memiki kepedulian yang sangat tinggi pada masyarakat dan pembangunan desanya. Di bawah kepemimpinannya, Anyer kini menjadi desa yang sangat terbuka dan memiliki mimpi masa depan yang sangat luar biasa. Ruang dan Peluangpun semakin terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkreasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Fasduk dan KPM bekerja dengan sangat nyaman dalam situasi yang sangat kondusif sehingga berdampak pada terbangunnya hubungan emosional yang sangat dalam, sehingga mampu mendorong minat warga terutama perempuan, warga miskin dan kaum marginal lainnya untuk ikut dan berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan termasuk memberikan ide dan ikut dalam pengambilan keputusan. Anyer dan seluruh warganya kini bermimpi untuk memaksimalkan asset demi mewujudkan Desa Mandiri.

Berikut adalah beberapa kutipan langsung dari Pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan warga.

1. Yunus Dg Taba (Tokoh masyarakat Aeng Towa)

"Kami sangat berterima kasih atas adanya program ini, Karena masyarakat menjadi semakin tahu dan pemerintahpun semakin terbuka. Sekarang kita tidak lagi bisa menggunakan alasan informasi yang terbatas sehingga kita tetap miskin. Karena kenyataannya kondisi itu sudah terbalik. Sekarang informasi tersedia cukup banyak, tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya. Fasduk dari FIK KSM sudah melakukan terobosan untuk membuat masyarakat terlibat penuh, yaitu jika tidak bisa hadir di pertemuan, maka Fasduk dan KPM mendatangi langsung ke rumah warga. Sehingga warga menjadi tahu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang lain."

2. Bohari Dg. Liwang

" Sangatlah bagus ada kegiatan seperti ini artinya apa yang kita rencanakan betul-betul kebutuhan masyarakat tapi saya yang setiap tahun ikut kegiatan musrembang. Mudah-mudahan pada musrembang tahun ini apa yang kami usulkan dapat terealisasi".

Sekian & Terima kasih